

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kesimpulan yang di peroleh untuk dalam menjawab rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Kondisi Empiris Kapasitas Kelembagaan Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Di Kabupaten Karawang

Kondisi empiris kapasitas kelembagaan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Karawang dilihat dari indikator *Capacities for Policy and Legal Frameworks* (Kemampuan dalam Kebijakan dan Kerangka Hukum), *Capacities for Implementation and Management* (Kemampuan dalam Implementasi dan Manajemen Program), *Capacities for Knowledge and Learning* (Kemampuan dalam Pengetahuan dan Pembelajaran Organisasi), *Capacities for Partnerships and Networks* (Kemampuan dalam Kemitraan dan Jaringan Kerja Sama) dan *Capacities for Leadership and Strategy* (Kemampuan Kepemimpinan dan Strategi Organisasi) masih berada dalam kondisi kurang memuaskan atau kurang bagus hal tersebut terlihat dari beberapa indikator di atas seperti penerpaan kebijakan, implelementasi program PKBM, pembelajaran dalam organisasi, kemitraan dan kepemimpinan yang menunjukan performa yang kurang baik, banyak masalah yang muncul yang diakibatkan dari kurang baiknya proses pendampingan yang dilakukan penilik terhadap pengelola serta kemampuan pengelola PKBM yang masih kurang dan memerlukan pendampingan secara khusus dan lebih intens. Meskipun di beberapa PKBM implementasi indikator tersebut sudah cukup baik. Selain itu proses pendampingan yang dilaksanakan oleh penilik terhadap pengelola PKBM sudah menunjukkan hubungan yang positif, penilik menjalin hubungan yang baik dengan pengelola melalui berbagai program yang kolaboratif, penilik mendampingi proses pengumpulan data Anamnesis, Sintesis dan

diagnosis, Pembuatan rencana tindakan dan Tindakan pertolongan terhadap permasalahan di PKBM. Namun belum semua PKBM memiliki hubungan positif tersebut. Beberapa PKBM masih kurang kolaboratif dalam proses pendampingan. Pada aspek Pemutusan Hubungan, PKBM di Kab Karawang masih belum sampai pada tahap tersebut. Ketergantungan terhadap penilik masih sangat besar dalam hal manajemen dan operasional kegiatan PKBM.

2. Masalah dan harapan pengelola tentang kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan PKBM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah utama yang dihadapi penilik dan pengelola PKBM di Kabupaten Karawang dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan meliputi keterbatasan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta dukungan pendanaan. Keterbatasan kompetensi manajerial dan teknis pengelola PKBM menjadi hambatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan nonformal. Selain itu, fasilitas yang minim seperti ruang belajar yang tidak memadai dan akses teknologi yang terbatas menghambat efektivitas pelaksanaan program. Kendala pendanaan juga menjadi masalah utama, di mana ketergantungan pada dana pemerintah yang sering tidak mencukupi membatasi kemampuan PKBM untuk mengembangkan program secara berkelanjutan. Di tengah tantangan tersebut, penilik dan pengelola memiliki harapan besar terhadap upaya peningkatan kapasitas kelembagaan. Mereka menginginkan program pelatihan yang lebih intensif dan berfokus pada kebutuhan lokal, seperti pelatihan manajerial, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan metode pengelolaan berbasis data. Selain itu, mereka berharap adanya dukungan yang lebih konsisten dari pemerintah dan sektor swasta dalam bentuk pendanaan, infrastruktur, dan sarana pembelajaran. Penilik juga berharap dapat meningkatkan efektivitas supervisi melalui penggunaan teknologi dan kolaborasi antarpemilik. Dengan kolaborasi yang lebih baik, dukungan yang berkelanjutan, dan pelatihan berbasis kebutuhan, kapasitas kelembagaan

PKBM di Kabupaten Karawang dapat ditingkatkan secara signifikan.

3. Konstruksi Model Pendampingan berbasis *Learning Exchange* dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Karawang.

Model *Learning Exchange* yang ditampilkan memvisualisasikan hubungan antara *Input*, *Proses*, dan *Output* sebagai fondasi utama pendampingan PKBM. Tiga jenis *Input* — *Personal Input*, *Instrumental Input*, dan *Environmental Input* — menjadi faktor penentu keberhasilan model ini. *Personal Input* yang meliputi pengelola PKBM dan Penilik berperan penting dalam memastikan implementasi pengetahuan yang diperoleh selama pendampingan. *Instrumental Input* yang meliputi bahan ajar, media ajar, strategi dan instrumen evaluasi, sedangkan *Environmental Input* yaitu lingkungan belajar dan budaya belajar. Ketiga input ini menjadi fondasi bagi proses pendampingan yang terstruktur, dimulai dari membangun kepercayaan, pengumpulan data anamnesis, sintesis dan diagnosis, hingga pembuatan rencana tindakan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap PKBM. Proses pendampingan yang digambarkan di bagian tengah model menekankan kolaborasi antara penilik dan pengelola, yang didasari oleh prinsip utama *Learning Exchange* seperti kesetaraan, fleksibilitas, transformasi, dan akuntabilitas. Proses ini tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan tetapi juga membangun kapasitas individu dan kelembagaan secara berkelanjutan. Tahapan ini menghasilkan lima *Output* utama: Kemampuan dalam *Capacities for Policy and Legal Frameworks* (Kemampuan dalam Kebijakan dan Kerangka Hukum), *Capacities for Implementation and Management* (Kemampuan dalam Implementasi dan Manajemen Program), *Capacities for Knowledge and Learning* (Kemampuan dalam Pengetahuan dan Pembelajaran Organisasi), *Capacities for Partnerships and Networks* (Kemampuan dalam Kemitraan dan Jaringan

Kerja Sama) dan *Capacities for Leadership and Strategy* (Kemampuan Kepemimpinan dan Strategi Organisasi). Visualisasi ini menegaskan bahwa setiap tahapan proses memiliki keterkaitan langsung dengan input yang diberikan dan menghasilkan output yang terukur dan berkelanjutan, sehingga memastikan bahwa PKBM mampu beroperasi secara mandiri dengan dukungan minimal dari pihak eksternal. Integrasi ketiga komponen ini memperkuat relevansi model *Learning Exchange* sebagai pendekatan efektif dalam meningkatkan kapasitas PKBM untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih berkualitas dan berdaya guna bagi masyarakat. (kapasitas kelembagaan)

5.2. Rekomendasi

Berikut rekomendasi berdasarkan hasil penelitian tentang model pendampingan berbasis *Learning Exchange* untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan PKBM di Kabupaten Karawang.

1. Rekomendasi untuk Pemerintah

a. Penguatan Kebijakan dan Dukungan Finansial

Pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang mendukung pengelolaan PKBM, dengan memastikan adanya alokasi anggaran yang memadai untuk pelatihan, pengembangan infrastruktur, dan program pendampingan berbasis kebutuhan lokal. Selain itu, diperlukan mekanisme distribusi dana yang lebih terstruktur agar setiap PKBM, termasuk yang berada di daerah terpencil, mendapatkan dukungan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan.

b. Fasilitasi Pelatihan Berkelanjutan

Pemerintah dapat menyelenggarakan program pelatihan berbasis kebutuhan dengan pendekatan praktis, seperti pelatihan manajerial untuk meningkatkan perencanaan dan pengelolaan anggaran, pelatihan teknis untuk pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, serta simulasi praktik terbaik dari PKBM yang telah berhasil. Selain itu, pelatihan perlu difokuskan pada peningkatan keterampilan supervisi penilik untuk memastikan pendampingan yang lebih efektif.

Devi Sulaeman, 2025

JUDUL UTAMA MODEL PENDAMPINGAN BERBASIS LEARNING EXCHANGE DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI KABUPATEN KARAWANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

c. Pengintegrasian Teknologi Digital

Pemerintah perlu menyediakan platform digital nasional yang dirancang khusus untuk mendukung pembelajaran kolaboratif antar-PKBM. Platform ini dapat digunakan untuk berbagi modul, memfasilitasi diskusi antarpemilik, serta melacak perkembangan program secara real-time.

2. Rekomendasi untuk Pemilik dan Pengelola PKBM

a. Optimalisasi Peran Supervisi

Pemilik perlu mengembangkan pendekatan supervisi yang berbasis kebutuhan lokal, dengan memanfaatkan data evaluasi dari setiap PKBM untuk menyusun strategi pendampingan yang lebih spesifik. Pemilik juga dapat meningkatkan keterlibatan langsung melalui kunjungan rutin yang terjadwal dan mentoring berbasis tantangan operasional yang dihadapi masing-masing PKBM.

b. Kolaborasi Antar Pemilik

Pemilik di wilayah yang sama perlu membentuk *forum kolaborasi supervisi*, di mana pengalaman dan solusi dari supervisi dapat dibagikan. Forum ini juga dapat digunakan untuk menyusun pendekatan pendampingan berbasis konteks yang lebih beragam namun fleksibel, guna mendukung pengelolaan PKBM secara merata.

c. Pemanfaatan Teknologi Supervisi

Pemilik disarankan untuk mengadopsi teknologi berbasis aplikasi, seperti *dashboard monitoring*, untuk mempermudah pengawasan kinerja PKBM. Dengan teknologi ini, data perkembangan setiap PKBM dapat diakses secara terpusat, memungkinkan analisis yang lebih efisien dan kolaborasi lintas wilayah.

3. Rekomendasi untuk Stakeholder Lain

a. Kemitraan dengan Sektor Swasta

Sektor swasta dapat dilibatkan secara aktif dalam mendukung pengelolaan PKBM melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Dukungan dapat berupa bantuan infrastruktur, penyediaan modul pembelajaran

berbasis teknologi, atau pelatihan yang relevan dengan kebutuhan operasional PKBM.

b. Pemberdayaan Komunitas Lokal

Pemangku kepentingan lokal, seperti tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, dapat dilibatkan dalam mendukung program pendidikan PKBM. Ini mencakup penyelenggaraan sosialisasi bersama tentang pentingnya pendidikan nonformal, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki.

c. Pemanfaatan Teknologi untuk Pembelajaran Kolaboratif

Stakeholder dapat mendorong penggunaan teknologi untuk memperluas akses pembelajaran kolaboratif antar-PKBM, seperti platform e-learning, media sosial untuk diskusi kelompok, atau webinar yang mempertemukan penilik dan pengelola secara rutin untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik.

4. Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan R&D. Metode R&D dalam penelitian ini diterapkan secara terbatas pada empat tahapan, yaitu (1) studi pendahuluan, (2) perancangan model, (3) uji coba terbatas, dan (4) evaluasi serta penyempurnaan model. Namun dari 4 tahapan tersebut, hanya dibatasi pada 2 tahapan yaitu studi pendahuluan dan pengembangan model. Sedangkan 2 tahapan lainnya yaitu uji coba terbatas dan evaluasi model direkomendasikan untuk diteliti lebih lanjut oleh para peneliti yang memiliki konsen pada model ini.